

## **Meneliti Beberapa Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

**Muhammad Nasrun** ✉

Universitas Muhammadiyah Makassar

### **Abstrak**

Penelitian ini mengidentifikasi pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemahaman akuntansi, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Luwu Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan populasi berjumlah 32 PD. Sampel sebanyak 64 orang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif serta regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sementara pemahaman akuntansi tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan, sedangkan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di kabupaten Luwu Utara.

**Kata Kunci:** *Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Akuntansi, Penerepan SAP, Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah.*

---

Copyright (c) 2024 Nasrun

✉ Corresponding author :

Email Address : [mnasrun@unismuh.ac.id](mailto:mnasrun@unismuh.ac.id)

## **PENDAHULUAN**

Laporan keuangan daerah merupakan salah satu aspek yang penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia (Sonjaya & Muslim, 2023). Laporan keuangan daerah yang berkualitas dapat memberikan informasi yang akurat dan transparan mengenai keadaan keuangan suatu daerah. Sebaliknya, laporan keuangan yang buruk dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan daerah, mengurangi kepercayaan publik, serta berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum (Rahim et al., 2020).

Perkembangan penelitian yang mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Indonesia dipicu oleh adanya tuntutan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di sektor publik, serta kompleksitas sistem pelaporan keuangan daerah. Berbagai faktor telah diidentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah di Indonesia. Kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal pemerintah telah terbukti berpengaruh positif (Jatmiko et al., 2020; Tambingon et al., 2018). Peran sistem informasi akuntansi juga signifikan, dengan sistem dan pengendalian internal mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Muda et al., 2018). Budaya organisasi dan kelemahan sistem pengendalian

internal telah ditemukan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Akuntabilitas dan transparansi juga merupakan faktor kunci (Herindraningrum & Yuhertiana, 2021). Faktor personal, sistem/administrasi, dan politik telah ditemukan secara tidak langsung mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan kinerja pemerintah (Nirwana & Haliah, 2018). Karakteristik perusahaan, termasuk karakteristik struktural dan pengawasan, telah terbukti berperan dalam membentuk kualitas pelaporan keuangan (Hasibuan, 2022). Sistem pengendalian internal dan teknologi informasi telah diidentifikasi sebagai faktor yang signifikan, sedangkan penerapan standar akuntansi pemerintah belum ditemukan memiliki hubungan yang signifikan dengan kualitas laporan keuangan (Aswar, 2020).

Beberapa faktor internal yang berpotensi mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah antara lain adalah kapasitas sumber daya manusia, tata kelola keuangan daerah, sistem informasi keuangan, serta prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan. Kekurangan dalam salah satu atau beberapa faktor internal tersebut dapat mengurangi kualitas laporan keuangan daerah. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan daerah secara tidak langsung. Beberapa faktor eksternal yang telah diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya meliputi tingkat korupsi, kualitas pengawasan dari pihak eksternal, serta tingkat perkembangan ekonomi daerah tersebut. Faktor-faktor ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Peraturan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia (SAKIP) memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur penyusunan laporan keuangan entitas pemerintah di Indonesia. SAKIP memberikan pedoman yang harus dipatuhi dalam menyusun laporan keuangan pemerintah agar memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam kaitannya dengan kalimat sebelumnya yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan tercermin dari karakteristik kualitatifnya, hubungan antara SAKIP dan karakteristik kualitatif laporan keuangan sangatlah erat. Salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan yang sangat penting adalah keandalan informasi. SAKIP memiliki peran dalam menjamin keandalan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah. Hal ini terkait dengan penerapan metode akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, seperti prinsip akrual dan konsistensi. SAKIP menetapkan pedoman yang harus diikuti dalam pencatatan transaksi keuangan pemerintah, sehingga informasi yang dihasilkan dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan. SAKIP menekankan pentingnya penyajian informasi yang relevan agar dapat memengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Dalam konteks ini, SAKIP menetapkan bahwa laporan keuangan pemerintah harus mencakup informasi yang relevan terkait dengan kinerja keuangan dan pencapaian tujuan-tujuan program atau kegiatan pemerintah. Dengan demikian, SAKIP membantu memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah memenuhi karakteristik kualitatif berupa relevansi.

SAKIP menekankan pentingnya penyajian informasi dengan cara yang mudah dipahami oleh pengguna yang tidak memiliki latar belakang keuangan yang mendalam. Oleh karena itu, SAKIP memberikan pedoman terkait penyajian informasi secara jelas dan tidak membingungkan dalam laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAKIP berperan dalam memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah memenuhi karakteristik kualitatif berupa pemahaman. SAKIP menetapkan bahwa laporan keuangan pemerintah harus disusun secara konsisten dari periode ke periode, serta mencakup informasi secara menyeluruh terkait dengan posisi keuangan dan kinerja pemerintah. Hal ini membantu memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah memenuhi karakteristik kualitatif berupa konsistensi dan keseluruhan.

Fenomena temuan pelanggaran atau ketidakpatuhan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti masalah serius yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di tingkat daerah. Pertama, dalam kasus Kabupaten Jember, BPK memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas LKPD tahun 2019. Temuan utama BPK mencakup ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan terkait dengan penganggaran dan realisasi belanja, pembayaran insentif pemungutan pajak yang tidak tepat, serta kekurangan volume pekerjaan belanja modal. Ketidakpatuhan ini menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan keuangan yang berdampak pada ketepatan dan keteraturan penggunaan anggaran. Kedua, Kabupaten Pulau Talibu mengalami masalah serupa dengan BPK memberikan opini TMP pada LKPD tahun 2019. Temuan BPK mencakup kelemahan dalam sistem pengendalian intern terkait dengan pengelolaan rekening kas daerah dan penyetoran pajak yang telah dipungut ke kas negara. Kelemahan ini mengindikasikan bahwa proses pengelolaan keuangan di tingkat daerah tidak berjalan dengan semestinya, yang berpotensi menimbulkan risiko atas penggunaan dana publik yang tidak terkontrol. Ketiga, Kabupaten Banggai Kepulauan juga menghadapi permasalahan serupa, dengan BPK memberikan opini TMP atas LKPD tahun 2020. Temuan BPK mencakup kelemahan dalam sistem pengendalian intern terkait dengan pertanggungjawaban belanja barang dan jasa, penyusunan laporan keuangan yang tidak memadai, pengelolaan kas daerah yang tidak efektif, serta kelemahan pencatatan dan mekanisme penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Ketidakpatuhan ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan di Kabupaten Banggai Kepulauan masih belum optimal, yang dapat berpotensi merugikan keuangan daerah dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Kasus-kasus yang disebutkan menunjukkan bahwa ada kelemahan dalam sistem pengendalian intern di berbagai kabupaten, yang pada gilirannya menyebabkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan tidak adanya jaminan atas keandalan informasi yang disajikan dalam LKPD. Fenomena ini menegaskan pentingnya implementasi standar akuntansi pemerintah, seperti yang diatur dalam Peraturan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia (SAKIP). SAKIP memberikan pedoman yang harus diikuti dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, termasuk aspek-aspek yang berkaitan dengan keandalan, relevansi, pemahaman, konsistensi, dan keseluruhan informasi yang disajikan. Namun, implementasi SAKIP belum sepenuhnya tercapai di beberapa daerah, seperti yang terlihat dari temuan BPK yang mencatat berbagai pelanggaran dan ketidakpatuhan dalam LKPD. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih proaktif dari pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pengendalian intern dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan keuangan. Hal ini meliputi peningkatan kapasitas dan kesadaran aparatur pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah, serta penguatan mekanisme pengawasan dan pengendalian internal. Melalui studi ini, diharapkan masalah-masalah yang terkait dengan pelaporan keuangan daerah dapat diminimalkan, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik dapat terwujud secara lebih optimal.

## **METODOLOGI**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan responden atas pertanyaan-pertanyaan yang tertera pada kuesioner. Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini

yaitu data primer yang diperoleh dengan cara membagikan kuesioner. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara membagikan kuesioner atau daftar pertanyaan kepada para pegawai PD di Kabupaten Luwu Utara sebagai responden. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu survey dengan teknik kuesioner. Survey dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner atau angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan topik penelitian kepada pegawai PD di Kabupaten Luwu Utara yang menjadi objek penelitian.

Teknik analisis data yang di gunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis linear berganda yang dilakukan melalui beberapa tahap pengujian seperti Uji Validitas, Uji Reabilitas, Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, Analisis Regresi Linear Berganda, Uji R<sup>2</sup> (Koefisien Determinasi) dan Uji Parsial (Uji t).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam studi ini, dilakukan uji validitas untuk mengevaluasi sejauh mana suatu alat ukur dapat diandalkan dan tepat dalam mengukur variabel yang dituju. Nilai R<sub>tabel</sub>, yang dihitung berdasarkan analisis derajat kebebasan (df), mengindikasikan ambang batas kevalidan yang harus terpenuhi. Dalam rumus  $df = n - k$ , 'n' adalah jumlah responden dan 'k' adalah jumlah variabel independen yang digunakan. Dalam konteks ini, df dihitung sebagai 92 (64-2). Dari tabel r product moment, nilai R<sub>tabel</sub> diperoleh sebesar 0.2042. Untuk menyatakan data valid, nilai R<sub>hitung</sub> dari semua variabel harus melebihi R<sub>tabel</sub> (0.2042). Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua data yang digunakan dalam studi ini dapat diandalkan dan tepat.

**Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Nilai of item	Keterangan
Kualitas LKPD	0.933	6	Reliabel
Kualitas SDM	0.841	6	Reliabel
Pemahaman Akuntansi	0.905	5	Reliabel
Penerapan SAP	0.925	3	Reliabel
System Pengendalian Intern	0.890	8	Reliabel

**Tabel 2. Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smimov Test**

		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.20918812
Most Extreme Differences	Absolute	.065
	Positive	.063
	Negative	-.065
Test Statistic		.065
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Pada tabel 2, pengujian Asymp sig (2-tailed) memperoleh nilai yaitu 0.200 > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kualitas SDM	.315	3.180
Pemahaman Akuntansi	.324	3.082
Penerapan SAP	.667	1.499
Sistem Pengendalian Intern	453	2.206

Tabel 3 merupakan hasil analisis tentang statistik kolinearitas dari model yang digunakan. Kolinearitas mengacu pada tingkat hubungan antara variabel independen dalam model statistik. Dalam tabel tersebut, terdapat dua statistik kolinearitas yang umum digunakan, yaitu toleransi (tolerance) dan faktor inflasi varians (VIF - Variance Inflation Factor). Toleransi adalah ukuran seberapa jauh variabel independen dalam model statistik tidak berkorelasi secara linier dengan variabel lainnya. Nilai toleransi berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai yang lebih rendah menunjukkan adanya kolinearitas yang lebih tinggi. Dalam kasus ini, variabel "Kualitas SDM" memiliki toleransi sebesar 0.315, "Pemahaman Akuntansi" sebesar 0.324, "Penerapan SAP" sebesar 0.667, dan "Sistem Pengendalian Intern" sebesar 0.453.

Faktor Inflasi Varians (VIF) adalah ukuran seberapa banyak varians dari suatu koefisien regresi diperbesar karena adanya kolinearitas. Nilai VIF yang lebih tinggi dari 1 menunjukkan adanya kolinearitas yang signifikan. Dalam tabel tersebut, "Kualitas SDM" memiliki VIF sebesar 3.180, "Pemahaman Akuntansi" sebesar 3.082, "Penerapan SAP" sebesar 1.499, dan "Sistem Pengendalian Intern" sebesar 2.206. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa variabel "Kualitas SDM" dan "Pemahaman Akuntansi" menunjukkan indikasi kolinearitas yang cukup tinggi, ditandai dengan nilai toleransi yang rendah dan VIF yang tinggi. Hal ini mengisyaratkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kedua variabel tersebut dalam model statistik yang digunakan, dan perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan kecocokan model dan interpretasi yang tepat.

Tahapan selanjutnya adalah melakukan uji heteroskedastisitas untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Analisis ini menggunakan uji spearman yang mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Hal ini dapat dilihat apabila dari probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5%.

**Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	.412	.208		1.981	.052	
Kualitas Sdm	-.171	.088	-.401	-1.944	.057	
Pemahaman Akuntansi	.076	.112	.140	.676	.502	
Penerapan SAP	.004	.068	.009	.064	.949	
Sistem Pengendalian Intern	-.010	.062	-.030	-.169	.866	

Berdasarkan dari output pada tabel 4, diketahui bahwa nilai signifikansi atau Sig. (2-tailed) variabel Kualitas SDM sebesar 0.057, variabel Pemahaman Akuntansi sebesar 0.502, variabel Penerapan SAP sebesar 0.949 dan variabel Sistem Pengendalian Intern sebesar 0.866. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam

penelitian ini memiliki tingkat probabilitas yang signifikan sehingga keempat variabel tidak memiliki gejala heterokedastisitas.

Nilai R<sup>2</sup> mempunyai interval antara 0 sampai 1 ( $0 < R^2 < 1$ ). Hasil pengolahan data yang dapat dilakukan dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.620 <sup>a</sup>	.385	.343	2.218

Berdasarkan pada tabel 5, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa besar nilai Rsquare yaitu 0,385 atau 38,5% yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dipengaruhi oleh variabel kualitas sumber daya manusia, pemahaman akuntansi, penerapan SAP, dan system pengendalian intern. Sedangkan sisanya sebesar 61,5 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Uji t atau uji parsial dilakukan dalam analisis statistik untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dalam suatu model. Tujuan utama dari uji t atau uji parsial adalah untuk mengevaluasi apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan taraf signifikansi sebesar 0.05 atau tingkat kepercayaan 95% dan nilai ttabel dengan derajat bebas ( $df = 59, \alpha = 0.05$ ) = 1.671

**Tabel 6. Hasil Uji t (Parsial)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11.899	3.362		3.539	.001
Kualitas SDM	.378	.183	.376	2.062	.044
Pemahaman Akuntansi	-.461	.264	-.313	1.746	.086
Penerapan SAP	.843	.252	.419	3.352	.001
Sistem Pengendalian Intern	.126	.098	.196	1.289	.202

Persamaan regresi yang berbentuk pada uji regresi ini adalah :

$$Y = (11.899) + 0.378 X_1 + -0.461 X_2 + 0.843 X_3 + 0.126 X_4 + e$$

Dari hasil analisis, variabel kualitas SDM menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel ( $2.062 > 1.671$ ) dan signifikansi 0.044 yang kurang dari  $\alpha$  0.05, sehingga H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima. Namun, variabel pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel ( $-1.746 > 1.671$ ) dan signifikansi 0.086 yang lebih dari  $\alpha$  0.05, sehingga H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>2</sub> ditolak. Selanjutnya, variabel penerapan SAP menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel ( $3.352 > 1.671$ ) dan signifikansi 0.001 yang kurang dari  $\alpha$  0.05,

sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima. Namun, variabel sistem pengendalian intern tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan nilai  $t$ -hitung lebih kecil dari nilai  $t$ -tabel ( $1.289 < 1.671$ ) dan signifikansi 0.202 yang lebih dari  $\alpha$  0.05, sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

## Pembahasan

Hasil uji hipotesis pertama dalam penelitian ini mengungkapkan hubungan positif dan signifikan antara kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Temuan ini didukung oleh Teori Agency, yang menekankan bahwa pemerintah, sebagai agen, memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi pengguna informasi keuangan pemerintah. Teori Agency menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian informasi keuangan. Dalam konteks ini, kualitas SDM dianggap sebagai faktor kunci yang memengaruhi kualitas LKPD. Dengan memiliki SDM yang berkualitas, terutama yang memiliki pemahaman mendalam tentang akuntansi, pemerintah dapat menyusun laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat dipercaya (Pramudiarta & Juliarto, 2015).

Pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi cenderung lebih mampu dalam menyusun laporan keuangan (Malviqui, 2021). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pengetahuan dan keterampilan dalam bidang akuntansi menjadi faktor penting dalam menjamin kualitas LKPD. Pegawai yang memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip akuntansi memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan dan menganalisis data keuangan dengan lebih baik, sehingga mampu menghasilkan laporan yang lebih informatif dan akurat. Kualitas SDM tidak hanya mencakup pengetahuan tentang akuntansi, tetapi juga kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam praktik. Penggunaan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan juga menjadi aspek penting yang dapat dipengaruhi oleh kualitas SDM. SDM yang terampil dalam menggunakan teknologi informasi akan lebih efisien dalam proses penyusunan laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan relevansi informasi yang disajikan. Hasil studi ini menegaskan pentingnya pelatihan dan pengembangan SDM dalam meningkatkan kualitas LKPD. Investasi dalam pengembangan keterampilan dan pengetahuan SDM di bidang akuntansi dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi efektivitas dan efisiensi penyusunan laporan keuangan pemerintah (Ansi D, 2022).

Hasil dari uji hipotesis kedua dalam penelitian ini memiliki temuan menarik yang menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Meskipun dalam pandangan Teori Stewardship menekankan pentingnya pemahaman akuntansi dalam menyajikan informasi keuangan yang bermanfaat, hasil ini menggambarkan suatu realitas yang menarik perhatian. Teori Stewardship menegaskan bahwa pemahaman akuntansi yang kuat merupakan fondasi yang vital bagi penyajian informasi keuangan yang transparan dan bermanfaat (Sari, 2022). Namun, temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pelatihan yang diberikan kepada pegawai belum mampu memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara harapan dari teori dengan kenyataan praktik di lapangan. Meskipun upaya telah dilakukan untuk memberikan pelatihan, namun belum cukup

efektif dalam mencapai tujuan meningkatkan pemahaman akuntansi para pegawai. Faktor yang mendasari hasil ini dapat bervariasi. Salah satunya mungkin adalah kurangnya fokus dalam penyusunan program pelatihan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman para pegawai. Pelatihan yang tidak terarah atau tidak memadai dalam menyampaikan konsep-konsep akuntansi yang kompleks dapat menyebabkan pegawai kesulitan untuk memahami materi yang diajarkan (Tanjung et al., 2021). Selain itu, faktor internal seperti motivasi individu dan kemampuan belajar juga dapat memengaruhi efektivitas pelatihan. Jika pegawai tidak memiliki motivasi yang cukup atau kurang mampu dalam memahami materi yang diajarkan, pelatihan tersebut mungkin tidak akan memberikan hasil yang optimal (Jumani & Rianto, 2023). Kekurangan sumber daya, baik dalam hal dana maupun tenaga pengajar yang berkualitas dapat menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pelatihan yang efektif.

Hasil dari uji hipotesis ketiga dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dengan implementasi yang tepat dan efektif dari SAP, kemungkinan kesalahan dan ketidaksesuaian dalam pencatatan keuangan dapat diminimalisir secara signifikan. Penerapan SAP secara efektif memungkinkan proses pencatatan keuangan menjadi lebih terstruktur, efisien, dan akurat (Rahim et al., 2020). Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan akan menjadi lebih andal dan relevan bagi pengguna informasi. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari penggunaan SAP dalam konteks pemerintahan, yaitu untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas informasi keuangan yang disajikan. Pegawai yang memahami dengan baik sistem SAP akan lebih mampu untuk mengoptimalkan penggunaannya dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan.

Hasil dari uji hipotesis keempat menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Meskipun SPI dianggap penting dalam memastikan keandalan dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan, temuan ini mengindikasikan bahwa terdapat kelemahan dalam implementasi SPI di lingkungan perangkat daerah Kabupaten Luwu Utara. Salah satunya mungkin terkait dengan kurangnya pemahaman yang mendalam tentang konsep SPI di kalangan pegawai perangkat daerah. Tanpa pemahaman yang memadai, implementasi SPI menjadi kurang efektif dalam memastikan kualitas LKPD. Kurangnya pengawasan dan monitoring terhadap implementasi SPI juga dapat menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dan kelemahan dalam sistem pengendalian intern (Sholehah et al., 2018). Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan dalam sistem pengendalian intern di perangkat daerah Kabupaten Luwu Utara, serta integrasinya dengan kebijakan akuntansi yang berlaku. Peran SPI dalam memastikan kualitas dan keandalan informasi keuangan tidak bisa diabaikan, terutama dalam konteks penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akurat. Peningkatan sistem pengendalian intern perlu dilakukan melalui berbagai langkah strategis, termasuk pengembangan kebijakan dan prosedur yang lebih ketat, pelatihan dan sosialisasi kepada pegawai perangkat daerah tentang konsep dan implementasi SPI, serta peningkatan pengawasan dan monitoring terhadap kepatuhan terhadap SPI. Selain itu, integrasi antara SPI dengan kebijakan akuntansi yang berlaku juga perlu diperkuat untuk memastikan keselarasan dan konsistensi dalam penyajian informasi keuangan.

## SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), serta Sistem Pengendalian Intern (SPI) memiliki dampak signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Meskipun pemahaman akuntansi tidak secara signifikan memengaruhi kualitas LKPD, pentingnya SDM yang berkualitas, implementasi SAP yang efektif, dan sistem pengendalian intern yang kuat terungkap sebagai faktor-faktor kunci dalam mendukung penyusunan LKPD yang akurat dan relevan. Secara praktis, hasil penelitian ini menekankan perlunya perbaikan dalam pengelolaan SDM, penerapan SAP, dan penguatan SPI di perangkat daerah Kabupaten Luwu Utara. Penelitian di masa depan disarankan untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang memengaruhi implementasi SAP dan SPI, pengembangan program pelatihan yang lebih efektif, serta investigasi dampak dari penggunaan teknologi informasi lainnya dalam penyusunan LKPD. Ini dapat memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang baik dan transparan di masa mendatang.

## Referensi :

- Ansi D, A. (2022). *PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Aswar, K. (2020). Assessing the impact of influencing factors on the quality of local government financial statements. *Pressacademia*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:216078627>
- Hasibuan, A. N. (2022). The Role of Company Characteristics in the Quality of Financial Reporting in Indonesian. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:246435882>
- Herindraningrum, F. F., & Yuhertiana, I. (2021). KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA : LITERATURE REVIEW. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:241619444>
- Jatmiko, B. W., Irawan, D., Machmuddah, Z., & Laras, T. (2020). Factors Affecting Regional Government Financial Statements: Evidence from Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 9, 89. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:216292114>
- Jumani, A., & Rianto, M. R. (2023). Literatur Review: Pengaruh Lingkungan Kerja, Pelatihan Dan Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan CV. Kita Sukses Mandiri. *Studi Ilmu Manajemen Dan Organisasi*, 4(1), 39–50.
- Malviqui, M. D. (2021). *Penyajian Laporan Keuangan Dengan Sesuai Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standart Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2019*. UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA.
- Muda, I., Harahap, A. H., Erlina, Ginting, S., Maksum, A., & Abubakar, E. (2018). Factors of quality of financial report of local government in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 126. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:169851189>
- Nirwana, & Haliah. (2018). Determinant factor of the quality of financial statements and performance of the government by adding contextual factors. *Asian Journal of Accounting Research*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:169159116>
- Pramudiarta, R., & Juliarto, A. (2015). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah (Studi Persepsi Pegawai SKPD di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Rahim, S., Ahmad, H., Muslim, M., & Nursadirah, A. (2020). Disclosure of Local Government Financial Statements in South Sulawesi. *Brawijaya International Conference on Multidisciplinary*

*Sciences and Technology (BICMST 2020)*, 1–6.

SARI, R. P. (2022). *Determinan akuntabilitas pengelolaan dana desa*.

Sholehah, N. L. H., Rahim, S., & Muslim, M. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu dan Personal Culture Terhadap Kecurangan Akuntansi. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 40–54.

Sonjaya, Y., & Muslim, M. (2023). A Look at How Regional Financial Accounting, Government Internal Control, and IT Affect Financial Statement Quality. *Bata Ilyas Journal of Accounting*, 4(1).

Tambingon, H. N., Yadiati, W., & Kewo, C. L. (2018). Determinant Factors Influencing the Quality of Financial Reporting Local Government in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8, 262–268. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:158106612>

Tanjung, R., Mawati, A. T., Ferinia, R., Nugraha, N. A., Simarmata, H. M. P., Sudarmanto, E., Hasibuan, A., Dewi, I. K., Gandasari, D., & Purba, B. (2021). *Organisasi dan manajemen*. Yayasan Kita Menulis.